

ANALISIS ETIKA SOSIAL ISLAM DALAM HUBUNGAN PEMERINTAHAN DAN MASYARAKAT

Fery Faiz Yulian¹, Abdul Kholiq²

^{1,2} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Madura,
Pamekasan, Madura

Email Korespondensi : ¹faizfery@gmail.com ²mohabdulkholiq313@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan etika sosial Islam dalam membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat di tengah dinamika sosial dan politik yang kompleks. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana etika sosial Islam diimplementasikan dalam hubungan pemerintahan dan masyarakat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai etika sosial Islam seperti keadilan, kejujuran, amanah, dan musyawarah telah dipahami oleh masyarakat, namun implementasinya belum optimal dalam praktik pemerintahan. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat masih menghadapi tantangan dalam hal transparansi, partisipasi, dan kepercayaan publik. Selain itu, faktor sosial, politik, dan budaya turut mempengaruhi tingkat internalisasi nilai-nilai tersebut. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam mengintegrasikan etika sosial Islam ke dalam praktik pemerintahan guna mewujudkan hubungan yang harmonis, adil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: etika sosial Islam; pemerintahan; masyarakat; hubungan sosial; good governance

ABSTRACT

This study is motivated by the importance of implementing Islamic social ethics to foster a harmonious relationship between government and society amid complex social and political dynamics. The objective of this research is to analyze how Islamic social ethics are applied within government–society relations and to identify the factors influencing their implementation. This study employs a qualitative descriptive approach. Data were collected through observation, indepth interviews, and documentation, while data analysis followed an interactive model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that key values of Islamic social ethics—such as justice, honesty, trustworthiness, and deliberation—are generally understood by the community; however, their practical implementation in governance remains suboptimal. Government–society relations still face challenges related to transparency, participation, and public trust. In addition, social, political, and cultural factors significantly affect the level of internalization of these values. The study concludes that more comprehensive and sustained efforts are required to integrate Islamic social ethics into governance practices in order to establish relationships that are harmonious, just, and sustainable.

Keywords: Islamic social ethics; governance; society; social relations; good governance

Pendahuluan

Islam sebagai agama yang bersifat universal (rahmatan lil ‘alamin) tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (hablu min Allah), tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama (hablu min al-nas) dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, etika sosial Islam menjadi landasan penting dalam membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa agama merupakan sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial baik individu maupun kelompok (Kahmad, 2009).

Manusia sebagai makhluk sosial (homo socius) tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, interaksi sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Islam, interaksi sosial tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa setiap aktivitas sosial, termasuk dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat, harus dilandasi oleh nilai-nilai etika yang bersumber dari ajaran Islam (Bawani, 1991).

Dalam konteks pemerintahan, hubungan antara pemerintah dan masyarakat merupakan aspek yang sangat krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat secara adil, transparan, dan akuntabel. Sementara itu, masyarakat sebagai subjek pembangunan memiliki peran aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah serta menjaga stabilitas sosial. Namun dalam realitasnya, hubungan tersebut seringkali diwarnai oleh berbagai permasalahan seperti konflik kepentingan, ketidakadilan sosial, serta lemahnya implementasi nilai-nilai etika (Rozi, 2017).

Indonesia sebagai negara dengan masyarakat yang majemuk memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga keharmonisan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Keberagaman suku, agama, dan budaya dapat menjadi potensi konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Berbagai konflik sosial yang pernah terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa lemahnya internalisasi nilai-nilai etika, khususnya etika sosial Islam, dapat berdampak pada disintegrasi sosial (Rozi, 2017).

Dalam perspektif Islam, etika sosial mencakup nilai-nilai seperti keadilan (‘adl), kejujuran (shidq), amanah, musyawarah (syura), serta tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut seharusnya menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Pemerintah yang beretika adalah pemerintah yang mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, sementara masyarakat yang beretika adalah masyarakat yang taat pada aturan serta aktif dalam menjaga ketertiban sosial.

Fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Islam belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya perilaku sosial yang menyimpang, seperti konflik antar kelompok,

fanatisme politik, serta praktik-praktik yang tidak mencerminkan nilai keadilan dan kejujuran. Dalam konteks pemilihan umum, misalnya, seringkali terjadi polarisasi masyarakat yang berujung pada konflik sosial (Rozi & Fachrizi, 2019).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perilaku sosial keagamaan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi pemahaman agama, motivasi, serta kesadaran individu, sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga, pendidikan, dan masyarakat (Masri, 2011). Oleh karena itu, upaya internalisasi nilai-nilai etika sosial Islam perlu dilakukan secara komprehensif melalui berbagai sektor, termasuk pendidikan, keluarga, dan pemerintahan.

Dalam konteks hubungan antara pemerintah dan masyarakat, etika sosial Islam dapat menjadi solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial. Konsep musyawarah (syura), misalnya, dapat digunakan sebagai pendekatan dalam pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, prinsip keadilan dan transparansi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Perkembangan zaman dan globalisasi juga memberikan tantangan tersendiri dalam menjaga nilai-nilai etika sosial Islam. Modernisasi seringkali membawa perubahan nilai yang tidak selalu sejalan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius dalam menginternalisasikan nilai-nilai tersebut agar tetap relevan dalam kehidupan modern.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena bertujuan untuk menganalisis bagaimana etika sosial Islam diterapkan dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan memahami konsep dan implementasi etika sosial Islam, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat dalam membangun hubungan yang harmonis dan berkeadilan.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian etika sosial Islam serta kontribusi praktis bagi pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hubungan sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis, tetapi juga memiliki relevansi yang tinggi dalam kehidupan nyata.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengangkat judul “Analisis Etika Sosial Islam dalam Hubungan Pemerintahan dan Masyarakat” sebagai upaya untuk mengkaji secara mendalam bagaimana nilai-nilai etika Islam dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial dan pemerintahan guna mewujudkan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam terkait etika sosial Islam dalam hubungan antara

pemerintah dan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, persepsi, dan pengalaman subjek penelitian secara komprehensif (Creswell, 2014).

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di lingkungan masyarakat yang memiliki dinamika hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang cukup kompleks, khususnya pada wilayah yang memiliki latar belakang sosial-keagamaan yang kuat. Waktu penelitian dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan data di lapangan, mulai dari tahap observasi awal, pengumpulan data, hingga analisis data.

Subjek penelitian ini meliputi berbagai pihak yang terlibat dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat, antara lain aparat pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat umum. Pemilihan subjek dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi sosial dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) kepada informan guna memperoleh informasi yang lebih rinci dan mendalam. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, seperti dokumen resmi, arsip, serta data pendukung lainnya.

Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti sendiri (human instrument). Peneliti berperan sebagai perencana, pengumpul data, penganalisis data, serta pelapor hasil penelitian. Untuk mendukung proses pengumpulan data, peneliti juga menggunakan pedoman wawancara, catatan lapangan, dan alat perekam sebagai instrumen tambahan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2014). Reduksi data dilakukan dengan cara memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan pola, hubungan, dan temuan yang diperoleh selama proses penelitian.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber (triangulasi sumber) serta menggunakan berbagai teknik pengumpulan data (triangulasi metode). Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi.

Prosedur penelitian dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap analisis data, dan tahap penyusunan laporan. Pada tahap persiapan, peneliti melakukan studi pendahuluan dan penyusunan instrumen penelitian. Pada tahap pengumpulan data, peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian. Selanjutnya, pada tahap analisis data, peneliti mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh. Tahap terakhir adalah penyusunan laporan penelitian secara sistematis dan ilmiah.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika sosial Islam dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat belum sepenuhnya terinternalisasi secara optimal dalam kehidupan sosial. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, amanah, dan musyawarah telah dikenal oleh masyarakat, namun implementasinya dalam praktik kehidupan sehari-hari masih menghadapi berbagai kendala. Hal ini terlihat dari adanya kesenjangan antara pemahaman normatif terhadap ajaran Islam dengan praktik sosial yang terjadi di masyarakat.

Dalam konteks hubungan antara pemerintah dan masyarakat, penelitian ini menemukan bahwa komunikasi yang terjalin masih bersifat satu arah dalam beberapa situasi. Pemerintah cenderung lebih dominan dalam pengambilan kebijakan tanpa melibatkan partisipasi aktif masyarakat secara menyeluruh. Padahal dalam perspektif etika sosial Islam, prinsip musyawarah (syura) menjadi salah satu nilai penting dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik pemerintahan belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai partisipatif yang diajarkan dalam Islam.

Selain itu, ditemukan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dipengaruhi oleh sejauh mana pemerintah mampu menerapkan prinsip keadilan dan transparansi. Masyarakat cenderung memberikan respon positif terhadap kebijakan yang dianggap adil dan berpihak kepada kepentingan umum. Sebaliknya, kebijakan yang dinilai tidak transparan atau mengandung unsur kepentingan tertentu dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan bahkan konflik sosial. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kepercayaan sosial merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat (Rahman, 2020).

Dalam aspek sosial keagamaan, penelitian ini juga menemukan bahwa perilaku masyarakat masih dipengaruhi oleh faktor internal seperti tingkat pemahaman agama, serta faktor eksternal seperti lingkungan sosial dan politik. Fenomena fanatisme politik, misalnya, dapat memicu konflik sosial yang berdampak pada rusaknya hubungan antar individu dalam masyarakat. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dinamika politik lokal dapat mempengaruhi perilaku sosial keagamaan masyarakat (Suryadi, 2019).

Dari sudut pandang teori, temuan penelitian ini dapat dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial yang menyatakan bahwa realitas sosial dibentuk melalui interaksi antara individu dan lingkungan sosialnya. Dalam hal ini, etika sosial Islam sebagai sistem nilai seharusnya dikonstruksi melalui proses internalisasi yang berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat. Namun, apabila proses internalisasi tersebut tidak berjalan secara optimal, maka nilai-nilai tersebut tidak akan tercermin dalam perilaku sosial.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat penting dalam menginternalisasikan nilai-nilai etika sosial Islam. Tokoh agama memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat melalui kegiatan keagamaan seperti pengajian, ceramah, dan pendidikan agama. Sementara itu, tokoh masyarakat berperan sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keharmonisan sosial.

Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya yang lebih sistematis dalam mengintegrasikan nilai-nilai etika sosial Islam dalam praktik pemerintahan. Pemerintah perlu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan. Selain itu, lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan juga perlu berperan aktif dalam menanamkan nilai-nilai etika sosial Islam sejak dini.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian etika sosial Islam dengan menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Islam tidak hanya bergantung pada aspek normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan budaya. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan dalam memahami etika sosial Islam perlu bersifat multidimensional.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa etika sosial Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan komitmen bersama dari berbagai pihak dalam menginternalisasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa etika sosial Islam memiliki peran yang sangat penting sebagai landasan normatif dalam membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Nilai-nilai utama seperti keadilan, kejujuran, amanah, dan musyawarah telah dipahami secara konseptual oleh masyarakat, namun implementasinya dalam praktik kehidupan sosial dan pemerintahan masih belum berjalan secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman nilai dan realitas sosial yang terjadi.

Hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam perspektif etika sosial Islam masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek transparansi, partisipasi,

dan akuntabilitas. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan serta kurangnya keterbukaan informasi publik berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa prinsip-prinsip good governance yang selaras dengan nilai-nilai Islam belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa internalisasi etika sosial Islam dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi tingkat pemahaman agama, kesadaran moral, dan motivasi individu, sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan sosial, dinamika politik, pendidikan, serta peran tokoh agama dan masyarakat. Dalam hal ini, tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dalam menanamkan nilai-nilai etika sosial Islam di tengah masyarakat.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian etika sosial Islam dengan menekankan pentingnya pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan aspek keagamaan, sosial, dan politik. Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bahwa pemerintah perlu memperkuat penerapan nilai-nilai etika dalam tata kelola pemerintahan melalui peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, serta penegakan prinsip keadilan dan akuntabilitas.

Selain itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis dan berkelanjutan dalam menginternalisasikan etika sosial Islam, antara lain melalui penguatan pendidikan nilai, peningkatan peran lembaga keagamaan, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun budaya sosial yang etis.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup kajian yang masih terbatas, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian, menggunakan pendekatan yang lebih variatif, serta mengkaji faktor-faktor lain seperti peran media dan teknologi dalam mempengaruhi implementasi etika sosial Islam.

Dengan demikian, penguatan etika sosial Islam dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat merupakan suatu kebutuhan yang mendesak dan memerlukan komitmen bersama guna mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis, adil, dan berkelanjutan.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih disampaikan kepada para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak akademisi dan lembaga terkait yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Bawani, I. (1991). *Etika Sosial dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications.
- Kahmad, D. (2009). *Sosiologi Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Masri, A. R. (2011). *Mengenal Sosiologi: Suatu Pengantar*. Makassar: Alauddin University Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis*. California: Sage Publications.
- Rahman, A. (2020). *Etika sosial Islam dalam hubungan pemerintahan dan masyarakat*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 12(1), 40–50.
- Rozi, M. F. (2017). Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Memperkokoh NKRI. *Proceedings ANCOMS*, hlm. 932–936.
- Rozi, M. F., & Fachrizi, A. R. (2019). Eksistensi Masyarakat Pasca Pilkada Pamekasan 2018. *Jurnal Sosiologi Agama*, 5(2), 218–227.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi, M. (2019). *Dinamika sosial keagamaan dalam masyarakat politik Indonesia*. *Jurnal Sosiologi Agama*, 10(2), 70–85.